

ABDULLAH BIN ABBAS Vs ALI BIN ABI THALIB ra; SUATU SEJARAH PENYIMPANGAN BAITUL MAAL BASRAH

Mashur Abadi

(Dosen Sejarah Peradaban Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan, nomor kontak 081330938931,
jurnalkarsa@gmail.com, alamat Prenduan Sumenep)

Abstract

The distortions of Islamic history has been begun in the formative period of classical Islam and it was done deliberately to win the interests of conflicting groups among the ummah. This article try to uncover this kind of distortion; and in doing so it must be based on the main source texts of classical Islam history. The case of Ibnu Abbas, in dealing with the public trassure of Basrah, will give a light how such distortions could be done easily by hiding a certain data of main source texts. It can be said that corruption of historical knowledge was aimed to wrapt corruptions in other aspects of Islamic history.

Kata-kata kunci

teks sumber, accepted history, baitul maal, korupsi.

Pendahuluan

Sejarah Islam yang diajarkan pada semua jenjang pendidikan Islam mulai dari tingkat *Ibtidaiyyah* sampai Perguruan Tinggi Islam, termasuk yang diselenggarakan oleh Pesantren di Indonesia, merupakan sebuah *accepted history*. Sebuah sejarah yang diterima begitu saja tanpa adanya suatu pembacaan kritis baik pada aspek sumber maupun ketajaman analisisnya. Akibatnya tidak heran jika buku-buku ajar Sejarah Islam tidak mengalami perubahan berarti. Buku-buku baru yang terbit kemudian lebih merupakan saduran dari buku-

buku sebelumnya yang telah dipandang sebagai buku standar. Sedangkan buku-buku yang dipandang standar ini merupakan upaya rekonstruksi sejarah Islam dengan merujuk pada *teks-teks sumber* (sumber-sumber utama)¹

¹Dalam hal ini saya berdasar pada kitab karya At Thabary, *Tarikh Arrusul wal Muluk*, yang biasa dikenal dengan nama *Tarikh At Thabary*, sebab karya ini merupakan teks sumber sejarah islam klasik dan menjadi sumber rujukan bagi kitab-kitab tarikh sesudahnya semisal kitab *Al Kaamil fi Taarikh* karya Ibnu Atsir. Seperti diketahui Ibnu Atsir mendasarkan karyanya tersebut pada At Thabary dalam mensejarahkan peristiwa-peristiwa mulai tahun 1 Hijrah sampai tahun 306 Hijrah. Artinya At Thabary merupakan sumber utamanya untuk kitabnya sampai

Jika diajukan keberatan akan otentisitas dan validitas terhadap teks sumber sejarah Islam semisal *Tarikh At Thabary* dengan menyatakan, bahwa teks sumber sejarah semacam ini akurasiya tidak seakurat hadist umpamanya, dan karenanya harus ditolak. Jika pandangan semacam ini diterima akibatnya adalah kita akan kehilangan seluruh sejarah Islam zaman klasik, paling tidak periode setelah Nabi SAW wafat sampai awal abad IV Hijrah.² Sesungguhnya sebagai teks sumber, *Tarikh At Thabary* tidak perlu diragukan meski cara pembacaannya harus tetap kritis. Problem krusial dalam kaitannya dengan menulis sejarah adalah kejujuran, dalam kasus yang akan dikemukakan berikut ini, berupa keberanian menyajikan data secara apa adanya dan tidak menutupinya demi kepentingan kelompok tertentu atau pribadi tertentu.

Persoalannya menjadi krusial dengan adanya fakta, bahwa para penulis buku-buku sejarah Islam tersebut dengan sengaja menyembunyikan data-data penting yang ada pada teks-teks sumber. Benar bahwa paparan tertentu yang menyangkut tokoh terkenal semisal Ustman bin Affan, memberikan gambaran tentang gejala korupsi pada masa pemerintahannya. Tetapi deskripsi yang dikemukakan sangatlah umum dan terlihat kesan kuat untuk menghindarkan pribadi tertentu dari kesalahan. Akibatnya gambaran yang muncul justru

membingungkan. Termasuk tentang dalang dibalik pembunuhan Ustman serta peristiwa-peristiwa yang menyertainya, sebelum dan sesudah pembunuhan dibiarkan dalam kekaburan.³

Tentu saja ada alasan dan kepentingan dalam menyembunyikan data-data penting pada periode tertentu dan dalam kasus sejarah Islam adalah periode yang dikenal sebagai masa *Khulafaaurasyidin*. Alasan yang sering dikemukakan adalah bahwa sejarah merupakan *tauladan* dan karenanya harus memberikan gambaran yang baik-baik dan indah. Sejarah harus steril dari darah, pengkhianatan, korupsi dan tindakan-tindakan buruk lainnya dari tokoh-tokoh yang terlanjur digambarkan terbebas dari kenafian kemanusiaan. Mereka adalah tokoh-tokoh “sempurna” dalam keimanan, akhlak dan ilmu. Alasan semacam ini dapat dibenarkan untuk dongeng tapi salah besar untuk sejarah. Sejarah adalah sebuah kejujuran tanpa syarat terhadap realitas kemanusiaan dengan segala darah, air mata dan juga pengkhianatan, ketamakan. Di samping keberanian, kecerdasan dan keindahan akhlak. Karenanya sejarah adalah *kaca benggala*,⁴ sebuah cermin bening tempat generasi sekarang dan nantinya akan berguru. Sejarawan bukanlah makhluk *partisan*.⁵ Komitmen sejarawan, seperti

tahun 3006 Hijrah. Dia mengakui bahwa untuk semua riwayat tentang sahabat Nabi SAW, dia menukilnya secara apa adanya dari At Thabary. Lihat Ibnu Atsir, *Al Kaamil fi Taarikh*, juz.1 h.1.

²Sejarah adalah rekonstruksi masa lalu yang didasarkan pada catatan berupa naskah atau lainnya. Artinya tanpa suatu sumber tertulis tidak akan ada sejarah, khususnya sejarah yang telah lama lewat waktunya. Di sinilah urgensi *Tarikh At Thabary* sebagai sumber tertua bagi kita untuk mensejarahkan zaman klasik Islam tersebut.

³Bandingkan dengan salah satu surat protes dari Malik bin Harist kepada Ustman bin Affan dengan kata-kata pembuka sebagai berikut “...dari Malik bin Harist kepada Khalifah yang ceroboh, salah, mengesampingkan sunnah nabiNya, dan menolak hukum-hukum Alquran”. Lihat Al Balaadzury, *Ansaab alAsyraf*, h.47 dalam Faraj Faudah, *Alhaqiqah Alghaibah*, Mesir:1987.

⁴ Syfi'i Ma'arif, *Kata Pengantar*, dalam M.Abd.Karim, *Islam Di Asia Tengah*, Bagaskara, Yogyakarta:2006.

⁵Ibn Khaldun menyatakan bahwa di samping beberapa faktor yang menyebabkan kesalahan dalam penulisan sejarah di antaranya ketidaktahuan terhadap fenomena zaman, maka faktor kepemihakan sejarawan kepada

ilmuwan lainnya, adalah kebenaran dan kejujuran dalam pengertian *rigid* dari kata itu.

Selain untuk membela pribadi tertentu seperti telah disinggung di atas, upaya menyembunyikan data-data tertentu tersebut juga dimaksudkan sebagai upaya untuk memuluskan jalan bagi proses ortodoksi kelompok tertentu, dalam hal ini adalah kelompok Sunni. Proses ortodoksi Sunni tidak mungkin berhasil tanpa menempatkan periode *formatitive* dalam bidang politis ini ke tingkat doktrin yang bersifat dogmatis. Sebagaimana diketahui kelompok Khawarij menegaskan, bahwa tampuk kepemimpinan ummat Islam menjadi hak setiap muslim dengan syarat dia memiliki sifat-sifat yang baik dan memiliki kompetensi memimpin. Pandangan egaliter Khawarij ini jelas berseberangan dengan doktrin Syi'ah yang telah menetapkan hak khilafah pada Ali bin Abi Thalib dan keturunannya dari jalur Fathimah.

Kelompok Sunni mencoba mengambil jalan tengah dengan mengklaim, bahwa empat khalifah yang ada (Abu Bakar, Umar, Ustman, Ali), bukan saja absah, tetapi juga merupakan *parexellence* dari semua nilai-nilai dan ajaran Islam. Tetapi penegasan doktriner ini dengan ditambahi dogma ekstra, yaitu bahwa imam harus berasal dari suku Quraysh.⁶

penguasa atau tokoh yang dikagumi merupakan salah satu faktornya. Lihat Ibn Khaldun, *Mukadimah*.

⁶Hadist nabi yang terkenal "*Al aimmatu minal quraysh*" sebenarnya merupakan *kalam khobary* yakni sebuah deskripsi atas realitas politis masa itu bahwa memang kenyataannya suku Quraysh lah yang memegang tampuk kepemimpinan masyarakat Arab sekitar Hijaz; dan bukan dalam bentuk *shighat 'amar* yang memiliki konsekuensi hukum. Tetapi hadist ini oleh kelompok Sunni dipahami sebagai instruksi yang mengikat secara hukum.

Dengan prinsip-prinsip di atas itulah saya mencoba membongkar fakta korupsi yang terjadi pada periode sejarah Islam yang terlanjur diyakini sebagai masa di mana nilai-nilai Islam secara *par excellence* teraktualisasikan secara sempurna. Dalam pengungkapan ini tidak dapat dihindari menyangkut tokoh-tokoh tertentu yang juga telah terlanjur diyakini terbebas dari cacat.

Penilaian yang digunakan bersifat *synchronic* dan *diacronyc* untuk memenuhi rasa keadilan dan seharusnya sesuatu diukur dengan kriteria zamannya. Penilaian suatu peristiwa masa lalu haruslah penilaian sezaman. Dalam kaitannya dengan korupsi dalam tulisan ini, konsep yang digunakan adalah segala tindakan yang melanggar dan merusak aturan hukum maupun moral serta nilai-nilai dasar ajaran Islam seperti amanah. Konsep korupsi semacam ini jelas mengusung universalitas dan karenanya *shaalihun likulli zamaan wa makaan*. Selain itu saya menggunakan teks-teks sumber yang selama ini menjadi rujukan para penulis sejarah Islam. Perbedaannya saya tidak berusaha menyembunyikan data-data tertentu yang dipandang dapat menodai kesucian periode emas sejarah Islam, yaitu masa *Khulafaurrasyidin*. Perbedaan lainnya adalah dalam analisis data. Saya tetap menggunakan *episteme* sezaman dalam menjelaskan realitas agar semua fenomena kesejarahan dapat dibaca dalam konteksnya termasuk pemahaman sezaman tentang sesuatu semisal kewenangan seorang penguasa dalam kaitannya dengan uang atau kekayaan negara.

Apakah gerangan *episteme* itu? Secara bebas boleh dikatakan bahwa *episteme* adalah suatu struktur yang cukup lama tetap sama dalam penalaran-penalaran yang dipakai manusia. Ada

tiga sifat utama *episteme*, yaitu pertama, *episteme* menentukan bagaimana melihat dan mengalami kenyataan. Artinya cara mengalami kenyataan menentukan bagaimana melihat kenyataan, struktur mana yang diterapkan pada kenyataan, dan benda-benda mana yang dilihat dalam kenyataan. Hal ini juga berarti bahwa *episteme* pada suatu periode tertentu untuk manusia yang hidup pada waktu itu, tidak disadari. Seketika *episteme* disadari, maka menjadi sadar bahwa melihat (bagian dari) kenyataan dengan cara tertentu dan dengan demikian terbuka jalan bagi pengalaman kenyataan yang lain. *Episteme* yang telah disadari kehilangan kesegarannya yang semula dan menjadi dibuat-buat⁷

Kedua, sifat *episteme* yang kedua berkaitan dengan larangan, penyangkalan, dan pengesampingan. Penalaran dan *episteme* mengatur dan mengontrol pengetahuan mengenai kenyataan, benda-benda yang ada di dalam kenyataan melalui tiga macam pengecualian, yaitu tabu, kegilaan dan ketidakbenaran. Identitas penalaran dan *episteme* tidak disebabkan oleh apa yang terkandung di dalamnya, melainkan oleh apa yang dikucilkan (larangan itu tidak disadari sama seperti *episteme* sendiri tidak disadari). Artinya setiap jaman ada kaca matanya sendiri dengan warna tertentu. Bila ingin menyusun kemabali sebuah *episteme*, kita selalu harus bertindak dari luar ke dalam, dari bidang yang tabu ke intinya yang positif⁸

Ketiga, sifat ketiga dari *episteme* adalah berkaitan dengan bagaimana diungkapkan suatu hubungan tertentu antara bahasa dan kenyataan. Bahasa

bukanlah suatu medium yang transparan, bukanlah pencerminan dari kenyataan. Bahasa adalah alat yang dipergunakan *episteme* guna mengatur dan menyusun kenyataan sesuai dengan tabiat *episteme* itu sendiri. Dari abad ke abad manusia menciptakan suatu lingkungan sosial sesuai dengan konsep-konsep dan *episteme-episteme* yang merupakan sarana untuk mencakup kenyataan dalam konsep-konsep. Pemakaian bahasa tidak menuju diberlakukannya kekuasaan, melainkan sama dengan diberlakukannya kekuasaan⁹

Kasus Ibnu Abbas

Tokoh ini amat terkenal di kalangan kaum muslimin sebagai seorang sahabat Nabi SAW yang memiliki lautan ilmu yang luas. Ibnu Abbas terkenal sebagai mufasir di kalangan sahabat dan dipandang sebagai bapak tafsir Alquran. Ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah dia diangkat sebagai gubernur Basrah¹⁰ Kasus Ibnu Abbas dalam kaitannya dengan *Baitul Maal* Basrah sungguh di luar dugaan semua orang. Tetapi teks-teks sumber menyebutkan bahwa *Baitul Maal* Basrah telah digunakan oleh Ibnu Abbas secara tidak benar dari tolok ukur zamannya maupun takaran universal. Deskripsi kasus ini sebagai berikut:

Bendahara *Baitul Maal* Basrah Abu Aswad Ad Dualy (ketika itu Ibnu Abbas menjabat sebagai gubernur Basrah) mengirim surat kepada Ali bin Abi Thalib yang tengah menjabat khalifah melaporkan tindakan korupsi yang dilakukan gubernurnya. Bunyi surat tersebut adalah "*Amma ba'du* sesungguhnya Allah telah menjadikanmu penguasa yang dipercaya

⁷F.R. Ankersmit, *Refleksi tentang Sejarah, Pendapat-pendapat Modern tentang Filsafat Sejarah*, terj. (Jakarta: Gramedia, 1987) hlm. 310.

⁸Ibid., hlm. 311.

⁹Ibid., hlm., 311-412

¹⁰At Thabary, *Tarikh Arrusul wal Muluk*, Juz 3 h.144, Maktabah Asyaamilah.

dan pemimpin yang berwenang...dan sungguh putra pamanmu (Ibnu Abbas) telah memakan harta yang berada di bawah kekuasaannya (*Baitul Maal*) tanpa sepengetahuanmu. Aku tidak mampu merahasiakan hal ini darimu. Maka lihatlah apa yang terjadi semoga Allah merahmatimu dan kemukakan pandanganmu tentang apa yang telah kusampaikan kepadamu”¹¹

Kemudian Ali bin Abi Thalib menyurati Ibnu Abbas tentang hal itu. Berikut adalah jawaban Ibnu Abbas, “*Amma Ba’du* adapun berita yang telah sampai kepadamu adalah bathil. Harta (*Baitul Maal*) yang berada ditanganku aman dan terpelihara. Janganlah engkau mempercayai tuduhan-tuduhan itu. *Wassalam*”. Karena jawaban Ibnu Abbas mengesankan tidak terjadi apa-apa dengan *Baitul Maal* Basrah, Ali bin Abi Thalib menulis surat kepadanya. “Maka beritahu aku apa yang engkau ambil dari *jizyah* dan dari mana engkau dapatkan? Dan engkau gunakan untuk apa? Menerima surat yang bernada interogasi ini, Ibnu Abbas menjawab, “*Amma ba’du*. Aku memahami kesedihanmu yang mendalam tentang berita yang sampai kepadamu, bahwa aku telah menghabiskan harta negeri ini. Maka utuslah (pejabat baru) yang engkau sukai karena aku akan segera menyingkir dari (Basrah)”¹² Dalam kitab *Arrusul wal Muluk* disebutkan bahwa Ibnu Abbas kemudian pindah ke Makkah beserta keluarga dan kerabatnya dengan membawa harta Basrah.¹³

Sementara Faraj Faudah dalam bukunya *Al Haqiqah Al Ghaaibah* secara rinci memaparkan kasus Ibnu Abbas dalam kaitannya dengan harta Basrah. Yang menarik dari paparan tersebut adalah jawaban Ibnu Abbas kepada Ali setelah dia mendapat peringatan dan nasehat Ali. Jawaban tersebut adalah sebagai berikut, “*Ammaa ba’du*. Telah sampai kepadaku suratmu yang membesar-besarkan persoalan pengambilan harta yang aku ambil dari kekayaan Basrah. Demi umurku sesungguhnya hakku atas *Baitul Maal* (Basrah) lebih besar dibanding hakmu. *Wassalam*”¹⁴ Lebih anehnya lagi dia melanjutkan suratnya kepada Ali bin Abi Thalib, yang berkali-kali memperingatkannya, dengan kata-kata sebagai berikut, “Jika engkau tidak berhenti mengganguku dengan dongenganmu, sungguh aku akan berikan harta (Basrah) ini kepada Muawiyah agar dia memerangimu dengan harta tersebut”¹⁵ Seperti diketahui pada saat itu terjadi konflik politik antara Ali dan Muawiyah.

At Thabary menyebutkan adanya perbedaan pendapat para sejarawan tentang kapan Ibnu Abbas pindah ke Makkah dengan membawa kekayaan Basrah. Sebagian menyatakan bahwa dia tetap tinggal di Basrah sampai Ali terbunuh baru dia pindah ke Makkah. Pandangan ini menyatakan bahwa dia ikut menyaksikan perdamaian dan

¹⁴Faraj Faudah, *Al Haqiqah Al Ghaaibah*, h.62.

¹⁵Faraj Faudah, *Al Haqiqah Al Ghaaibah*, h.62. Dalam buku *Al Haqiqah Al Ghaaibah* ini, Faraj Faudah ketika memaparkan jawaban Ibnu Abbas bahwa dia akan memberikan kekayaan Basrah kepada Muawiyah, tidak menyebutkan rujukan sumbernya. Tetapi jika dilihat paparan sebelumnya ketika memaparkan surat-surat antara Ali dan Ibnu Abbas menanggapi laporan Abu Aswad Adualy tentang penyalahgunaan baitul maal Basrah, dia mendasarkan paparannya pada *Tarikh At Thobary*, Juz 4, h.104-109, Muasasah al A’lami, Beirut.

¹¹At Thabary, *Tarikh Arrusul wal Muluk*, Juz 3 h.146, Maktabah Asyaamilah.

¹²At Thabary, *Tarikh Arrusul wal Muluk*, Juz 3, h.146, Maktabah Asyaamilah.

¹³At Thabary, *Tarikh Arrusul wal Muluk*, Juz 3, h.146, Maktabah Asyaamilah.

penyerahan kekuasaan antara Hasan bin Ali kepada Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Tetapi sebagian besar ahli sejarah, tutur At Thabary, mengatakan bahwa Ibnu Abbas pindah ke Mekkah semasa Ali masih hidup. Dan yang menyaksikan perdamaian antara Hasan bin Ali dengan Mu'awiyah adalah Ubaidillah ibnu Abbas dan bukan Abdullah bin Abbas¹⁶

Di atas disebutkan bahwa jawaban Ibnu Abbas kepada Ali adalah bahwa dia lebih berhak atas kekayaan Basrah dari pada Ali bin Abi Thalib. Jawaban ini menarik karena menimbulkan banyak asumsi, di antaranya;

1. Dengan jawaban itu Ibnu Abbas tidak merasa melakukan tindakan yang salah karena kekayaan Basrah merupakan haknya. Persoalan hukum muncul terkait dengan batas hak kekuasaan seorang kepala daerah (gubernur) atas *Baitul Maal*, baik hak dalam pengelolaannya maupun seberapa besar jumlah kekayaan yang dapat dia gunakan untuk keperluan pribadinya. Preseden yang ada dalam persoalan ini bersifat etis seperti pada praksis Umar bin Khatab tetapi belum menjadi suatu ketetapan hukum yang dapat dirujuk oleh para pemimpin sesudahnya. Asumsi pada point kesatu ini memperlihatkan betapa lembaga-lembaga kenegaraan dan pemerintahan merupakan kreasi anak zamannya dan karenanya berdialektika dengan perkembangan zamannya. Tentu saja hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi kalangan ahli fiqh untuk merumuskan ketetapan-ketetapan hukum dalam fiqh siyasah.
2. Dalam konteks permintaan Ali kepada Ibnu Abbas yang berbunyi "Berapa besar jizyah yang engkau

ambil dan dari mana engkau dapatkan? Dan untuk apa engkau pergunakan?" sebenarnya adalah suatu perintah pertanggungjawaban bawahan kepada atasan (gubernur kepada khalifah). Tetapi dengan jawaban tersebut dapat dipahami bahwa *accountability dan responsibility* sebuah laporan keuangan belum terumuskan secara baik sehingga Ibnu Abbas merasa hal itu bukan menjadi kewajibannya.

3. Jawaban Ibnu Abbas tersebut memperlihatkan bahwa batasan *public property* atau *public treasure (maal al ummah)* dengan *private property* dalam kaitannya dengan penguasa tidaklah jelas.
4. Ibnu Abbas tahu bahwa yang dia lakukan adalah salah tetapi mencoba mencari pembenaran dengan berdasar pada nasabnya sebagai putera Abbas paman Nabi SAW melalui kata-katanya "Aku lebih berhak atasmu." Seperti diketahui Abbas bin Abdul Muthalib masuk Islam sementara Abu Thalib, ayahnya Ali, tetap dalam kekufurannya sehingga ini menjadi *exuse* Ibnu Abbas bahwa dia lebih berhak dibanding Ali. Asumsi pada point keempat ini memperlihatkan, bahwa di satu sisi betapa nilai dan ajaran Islam tentang egalitarianisme masih bercampur dengan tradisi lokal Arab yang mengedepankan kedekatan darah. Sedangkan di sisi yang lain, seperti terbukti dalam tindakan Ibnu Abbas yang memanggil semua kerabatnya untuk diberi bekal dari *Baitul Maal* sebelum pindah ke Mekkah¹⁷, betapa batasan hak publik dengan hak pribadi penguasa sama sekali belum terumuskan. Artinya

¹⁶At Thabary, *Tarikh Arrusul wal Muluk*, Juz 3, h.146

¹⁷At Thabary, *Tarikh Arrusul Wal Muluk*, juz.3 h.146.

dapat dipahami bahwa tindakan Ibnu Abbas memberikan harta *Baitul Maal* Basrah kepada sanak kerabatnya adalah suatu praktek yang biasa pada masa itu dengan mengingat nilai komunal yang masih kuat melekat pada masyarakat Arab.

5. Bahwa apa yang dilakukan Ibnu Abbas adalah salah atas dasar dan tolok ukur apapun terlebih jika dibandingkan dengan praktek Umar bin Khatab yang sangat berhati-hati dalam berhadapan dengan harta kaum muslimin semasa menjabat sebagai khalifah. Asumsi keempat ini lebih mendekati kebenaran dengan melihat gaya hidup Ibnu Abbas yang sangat mewah setelah dia pindah ke Mekkah.¹⁸ Asumsi kelima ini selayaknya dibaca sebagai sesuatu yang manusiawi, bahwa betapa godaan harta merupakan *pit fall* anak Adam, siapapun dia kecuali para Nabi dan Rasul yang telah dijamin *ke-ma'shum*-annya. Terlebih jika hal itu dilakukan dalam konteks suatu masa di mana belum ada batasan dan aturan yang tegas tentang hak penguasa dalam kaitannya dengan harta negara.

Akhirnya mungkin muncul pertanyaan untuk apa membuka luka lama terlebih menyangkut seorang tokoh sekaliber Ibnu Abbas¹⁹. Jawabannya paling tidak pertama, menyentuh persoalan kejujuran ilmiah sebagai hal mutlak agar ilmu dapat menjadi *kaca benggala* bahwa yang *ma'shum* hanyalah

Rasulullah SAW. Dengan pernyataan ini diperlukan suatu pembacaan baru yang jujur sekaligus kritis menyangkut ucapan-ucapan yang dinisbahkan kepada Nabi SAW mengenai sifat dan kedudukan para sahabatnya. Bagaimana kita memahami puluhan dan bahkan ratusan ribu darah sesama kaum muslimin tumpah dan di dalamnya para sahabat Nabi SAW saling berhadapan sebagai musuh, sementara diyakini bahwa semua sahabat adalah *'uduul*. Begitu juga pernyataan-pernyataan lain yang dinisbahkan pada ucapan Nabi SAW seperti "Para sahabatku seperti bintang", atau sebuah ucapan yang sangat terkenal yang diyakini sebagai hadist, "Wajib atas kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para *khalifah rasyiidah* sesudahku". Pembacaan kritis dengan menggunakan kesadaran dan pendekatan kesejarahan bahwa teks seharusnya tidak dilepaskan dari ruang dan waktu kesejarahannya.

Ini merupakan signifikansi utama tulisan ini, bahwa betapa sikap dan pernyataan ideologis dapat menyesatkan akal sehat dengan cara memanipulasi sejarah dalam bentuk generalisasi kondisi suatu periode sejarah. Pernyataan bahwa masa *khulafaurrasyidin* merupakan sejarah emas dan diyakini bahwa pada masa ini nilai dan ajaran Islam teraktualisasikan secara sempurna, dan atau bahwa bentuk pemerintahan kekhilafahan merupakan bagian tak terpisahkan dari Islam sebagai agama adalah tidak benar secara kesejarahan melalui data-data sejarah yang selama ini dengan sengaja ditutup-tutupi. Senyatanya kekhilafahan adalah suatu bentuk ijtihad para sahabat untuk menjawab persoalan zamannya menyangkut cara pengelolaan kekuasaan. Sebagai sebuah ijtihad, ia bisa jadi benar dan juga bisa salah. Dan yang lebih

¹⁸Disebutkan bahwa dia menghabiskan 3000 dinar untuk membeli tiga jariyyah. Lihat Faraj Faudah, *Al Haqiqah Al Ghaibah*, h.60.

¹⁹Dalam sebuah hadist riwayat Bukhary disebutkan bahwa Nabi SAW pernah merangkul Ibnu Abbas dan mendoakannya agar memiliki hikmah. Lihat *Shahih Bukhary*, *Kitab Mana'iqib*, Hadist No.3473, dalam *Al Maktabah Asyaamilah*.

penting setiap zaman memerlukan kecerdasan dan ijtihad baru. Tidak lebih tidak kurang.

Khilafah sebagai bentuk pemerintahan Islam yang dipilih oleh ummat Islam masa itu benar-benar merupakan ijtihad sebab dalam proses dan cara pemilihannya tidak sampai pada tingkat *ijma'*. Seperti disebutkan dalam teks-teks sumber klasik sejarah Islam, lagi-lagi sumber utamanya adalah *Tarikh At Thabary*, kelompok Anshar mengajukan imamnya sendiri. Dalam peristiwa *tsaqifah bani Sa'idah* konflik kekuasaan Anshar-Muhajirin ini diselesaikan dengan cara yang menyisakan banyak pertanyaan. Tidak seperti yang biasa kita baca pada buku-buku ajar Sejarah Islam (*accepted history*) yang menggambarkan peristiwa tersebut sebagai berjalan dengan lancar dan semua orang yang hadir sepakat memberikan bai'at kepada Abu Bakar. Senyatanya peristiwa tersebut tidak sesederhana seperti yang kita yakini selama ini.

Dalam peristiwa tersebut yang terjadi sesungguhnya merupakan kebingungan ummat yang masih baru dan harus menghadapi persoalan-persoalan zamannya tanpa ada wahyu dan pemimpin yang membimbingnya. Sementara tata cara dan siapa pemimpin yang akan menggantikan Nabi SAW dalam urusan ummat masih belum terpikirkan. Maka dalam situasi gamang tersebut, ummat Islam Madinah yang didominasi oleh kelompok Muhajirin dan Anshar mengalami suasana *chaos* karena masing-masing kelompok mengajukan calonnya. Ketika jalan dialog mencapai kebuntuan, maka kelompok Anshar mengajukan usulan, bahwa masing-masing kelompok memilih pemimpinnya sendiri. Saat usulan ini juga mengalami

kebuntuan kita hanya diberitahu, bahwa tiba-tiba Umar dengan suaranya yang lantang berteriak membaiaat Abu Bakar dan semua orang mengikutinya.²⁰

Sedangkan untuk khalifah kedua, Umar bin Khatab menggunakan cara penunjukkan langsung. At Thabary memaparkan kepada kita bahwa sebelum Abu Bakar wafat dia menulis sebuah surat tertutup kemudian meminta untuk disampaikan kepada Umar. Setelah dibuka berisi penunjukkan Umar sebagai khalifah, dan orang-orangpun membaiaatnya.²¹ Ustman bin Affan terpilih melalui formatur yang telah ditentukan oleh Umar, dan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah melalui pembaiatan langsung.

Penutup

Apa yang ingin saya tegaskan adalah, bahwa tata cara dan bentuk pemerintahan yang dipilih Umat Islam pada masa itu merupakan ijtihad politik dan bukan bagian dari agama. Jika dikatakan bahwa imam harus berasal dari Quraysh berdasar pada sabda Nabi SAW, maka pastilah tidak akan terjadi *chaos* antara Muhajirin-Anshar, dan jika hadist Ghadir Khum benar tentang penetapan Ali oleh Nabi SAW sebagai penggantinya,

²⁰Fakta yang sering dilupakan adalah bahwa telah terjadi chaos sepeninggal Nabi SAW menyangkut imamah yang menyebabkan konflik kepentingan diantara Muhajirin-Anshar. Dalam peristiwa *tsaqifah Bani Saidah*, disebutkan oleh Thabary yang dikutip oleh Mernisi, terjadi kerusuhan sampai –sampai beberapa orang terinjak-injak; dan akibatnya jasad Nabi SAW dibiarkan selama tiga hari dan hanya ditunggu Ali dan Fatimah. Sementara ajaran Nabi SAW tentang jenazah adalah menyegerakan peguburannya. Tetapi dalam sejarah yang selama ini kita baca, penguburan Nabi SAW ditunda karena banyaknya orang yang melayat. Lihat Fatimah Mernisi, *Kontroversi Peran Wanita dalam Politik*, terjemahan Masyhur Abadi, Dunia Ilmu, Surabaya:1998.

²¹Faraj Faudah, *Alhaqiqah Alghaaibah*,h.67.

pastilah Abu Bakar dan Umar akan menolak pembaiatan dirinya sebab siapa yang berani menyangsikan kedekatan dan kepatuhan Abu Bakar serta Umar kepada semua ucapan dan tindakan Nabi SAW. Fakta-fakta sejarah ini semakin menegaskan, bahwa khilafah adalah bukan bagian dari agama. Dengan data-data kesejarahan di atas apakah masih relevan dan signifikan seruan ideologis

“Khilafah Khilafah”—sebagaimana dengan nyaring disuarakan *Hizbut Tahrir*—sebagai solusi persoalan umat, atau justru cara berpikir ahistoris²² semacam ini akan menambah persolan umat, karena membiarkan pikiran terbekukan dalam waktu di masa lalu justru di saat umat ini memerlukan kecerdasan ijtihad agar dapat berjalan bersama zaman. *Wa Allāh a’lam bi al-sawāb*□



²²Saya menyatakan bahwa seruan kepada khilafah pada milenium ketiga sebagai solusi persoalan-persoalan ummat islam sebagai cara berpikir buta sejarah karena seruan ini didasarkan pada asumsi:1.Bahwa khilafah adalah bagian dari agama;2.bahwa khilafah, dalam hal ini adalah masa khulafaurrasyidin, merupakan the real golden age di mana nilai dan ajaran islam teraktualisasikan secara sempurna dan karenanya menjadi model yang harus dibakukan. Dua asumsi ini jelas keliru jika dengan berdasar pada data dan fakta kesejarahan.

